

Analisis Kesejahteraan Petani Tembakau Dampak Politik Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi

Fachmi Ibrahim^{1*}, Rasmira², Khori Suci Maifianti³

¹Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Pertanian, Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian, Bogor, Indonesia

³Fakultas Pertanian, Agribisnis, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

Email: ¹fachmi.ibrahim@uai.ac.id, ²rasmira@pertanian.go.id, ³khorism@utu.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak– Selama pandemi Covid-19 berbagai permasalahan dihadapi oleh para petani seperti stabilitas harga, distribusi, dan ketidakpastian pembelian hasil produksi tani. Oleh karena itu dituntut agar pemerintah membuat kebijakan yang mendukung para petani. Pertanian termasuk satu diantara sektor yang tetap eksis di masa pandemi Covid-19, terbukti pada kuartal II 2020 meyumbang 15,46% terhadap total produk domestik bruto (PDB) dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Politik kebijakan pertama yang dikeluarkan pemerintah berupa *social dan physical distancing* membuat pergerakan masyarakat menjadi terbatas. Dinamika perkembangan Covid-19 tidak terbendung sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin menurunkan roda perekonomian Indonesia. Apapun kebijakan yang dikeluarkan pasti berdampak terhadap hasil pertanian sehingga mengganggu kesejahteraan para petani. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kesejahteraan petani tembakau terkait kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 dengan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai dampak akibat pandemi Covid-19, namun kebijakan pemerintah terkait pertanian selama pandemi Covid-19 belum berpihak pada pelaku petani tembakau, karenanya dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat *top-down* tetapi berdasarkan analisis situasi dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Petani Tembakau, Pandemi Covid-19

Abstract– During the Covid-19 pandemic various problems faced by farmers such as price stability, distribution, and uncertainty of purchasing agricultural products. Therefore, it is required the government make policies that support farmers. Agriculture is one of the sectors that continue to exist during the Covid-19 pandemic, proven in the second quarter of 2020 to contribute 15.46% to the total gross domestic product (GDP) and play an important role in the Indonesian economy. The first policy issued by the government in the form of *social and physical distancing* make the movement of people limited. The dynamics of the development of Covid-19 are unstoppable so that the government issued a Large-Scale Social Restriction Policy (PSBB) that further lowers the wheels of the Indonesian economy. Whatever policy is issued have an impact on agricultural products to disrupt the welfare of farmers. The aim of the study is to analyze the well-being of tobacco farmers related to government policies during the Covid-19 pandemic with a case study approach and qualitative methods of phenomenology. The results showed there were various impacts due to the Covid-19 pandemic, but government policies related to agriculture during the Covid-19 pandemic have not sided with tobacco farmers, therefore, policies are needed that are not only *top-down* but based on the analysis of the situation and needs of the community.

Keywords: Government Policy, Tobacco Farmers, Covid-19 Pandemic

1. PENDAHULUAN

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap berbagai sektor. Di belahan dunia setiap kebijakan yang dikeluarkan negaranya ditetapkan dengan penuh kehati-hatian. Pandemi Covid-19 adalah krisis besar yang tidak pernah ada sebelumnya, menghasilkan perubahan yang tak terduga. Beberapa perubahan ini terbukti dalam praktik kebijakan yang dapat mengarah pada solusi inovatif yang terjadi dengan cepat. *The Covid-19 pandemic is a crisis in magnitude not seen before, yielding unforeseen changes. Some of these changes are evident in policy practices that can lead to innovative solutions that occur quickly* (Parnell et al., 2022). Demikian pula halnya di Indonesia, perubahan kebijakan pemerintah terkait Covid-19 sangat dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kerjasama masyarakat diperlukan untuk setiap saat mampu beradaptasi terhadap setiap intervensi pemerintah dalam melindungi warganya.

Politik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia baik yang tertulis maupun tidak tertulis diantaranya Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, seperti PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019. Kebijakan ini mengatur pergerakan orang serta barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing yang ditandatangani Presiden tanggal 31 Maret 2020. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 untuk menekan kasus positif. Inpres ini mengatur sanksi bagi pelanggar yang ditentukan dalam peraturan di masing-masing daerah. Selanjutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pembatasan ini untuk menekan angka kasus Covid-19 yang hanya diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. PPKM berlangsung dalam dua tahap dan dilanjutkan dengan PPKM mikro yang penanganannya lebih kecil di tingkat desa atau kelurahan.

Kebijakan yang dikeluarkan tentunya ada harapan untuk menyelamatkan sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Diantara sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah ekonomi, karena dampak dari pandemi adalah terjadinya penurunan perputaran roda bisnis. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut empat sektor yang paling tertekan akibat Covid-19, yaitu rumah tangga yang mengalami penurunan dari sisi konsumsi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), korporasi dan sektor keuangan (republika.co.id). Bahkan UMKM yang selama ini mampu melewati berbagai krisis sebagai *safety net* (jaring pengaman) turut terpukul akibat adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial. Berbeda dibanding krisis 1997-1998 dimana UMKM masih resilien, kali ini termasuk yang terkena dampak paling depan karena berkurangnya kegiatan masyarakat.

Pertanian menjadi satu-satunya sektor lapangan usaha dari lima sektor terbesar penyumbang produk domestik bruto (PDB) yang mampu tumbuh positif. Sektor pertanian tercatat tumbuh 2,19% pada kuartal II pandemi. Sementara, empat sektor besar lainnya yakni industri, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi mengalami pertumbuhan minus. Bagaimana dengan subsektor perkebunan, khususnya tembakau? Industri hasil tembakau ikut terpukul dampak pandemi Covid-19 seiring penurunan konsumsi rokok. Pemicunya selain alasan kesehatan, faktor ekonomi akibat berkurangnya pendapatan dan rencana pemerintah menaikkan cukai akan semakin memukul industri rokok yang berdampak pada petani tembakau.

Pertanian tembakau di Indonesia tersebar di 15 provinsi dengan sentra di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa total lahan yang dikhususkan untuk pertanian tembakau di seluruh nusantara terus tumbuh dari 198,657 ha pada tahun 1975 menjadi 204.961 ha dan nampaknya akan semakin meluas. Jawa Timur menduduki sekitar 49%, diikuti oleh Jawa Tengah 24,7% dan Barat Nusa Tenggara 15,6%. Luasnya area pertanian tembakau di Indonesia dari beberapa literatur yang diperoleh, berdampak pada pendapatan yang menurun di masa pandemi Covid-19. Seperti di Kabupaten Jombang, penelitian Wahyuni dan Dinaloni (2021) menyatakan terjadinya penurunan harga tembakau disebabkan faktor cuaca dan kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah. Di Temanggung, pabrik mengumumkan pengurangan pembelian tembakau petani karena alasan terbatasnya daya beli akibat Covid-19. Kemudian di Desa Palongan Kabupaten Sumenep, penelitian Andrianingsih dan Asih (2021) juga melihat terjadinya penurunan pendapatan petani tembakau sebesar 40% karena pandemi sejak diterapkan kebijakan *social distancing* yang membatasi kegiatan masyarakat serta kebijakan penutupan beberapa instansi non krusial (Andrianingsih & Laras Asih, 2021).

Selain itu pandemi menjadi alasan pemerintah untuk menunda pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. Penundaan pembahasan karena isu yang ditekankan adalah perihal penurunan kesejahteraan petani bila produksi tembakau dibatasi. Padahal isu yang menjadi permasalahan menurut Widyastuti Soerojo, Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Komnas Pengendalian Tembakau lebih pada harga jual di kalangan petani, impor tembakau, masalah hama, dan tidak ada perlindungan terhadap tembakau. Kesannya pemerintah masih setengah hati mengendalikan tembakau sebagai bahan baku industri rokok yang mengancam kesehatan.

Di masa pandemi Covid-19 para petani khususnya petani tembakau mengalami masalah dalam pendapatan hasil usahatani dan dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Bagaimana

sebenarnya kesejahteraan petani tembakau akibat kebijakan pemerintah di masa pandemi, mulai dari kebijakan pembatasan sosial, hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kesejahteraan petani tembakau akibat kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

2. METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologi yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu (Creswell & Poth, 2018). Data yang diperoleh berupa penelitian terdahulu dan hasil kutipan di media massa kemudian diproses secara deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu dengan cara menarasikan data yang telah dianalisis (Djamba & Neuman, 2002).

Wilayah penelitian literatur yang diambil dikhususkan di Jawa Timur karena merupakan wilayah terpusat penghasil tembakau terbesar dengan cakupan lahan yang paling luas di Indonesia. Analisis yang dilakukan berupa perbandingan beragam referensi terhadap fenomena yang terkait kesejahteraan petani tembakau akibat kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu dan kutipan dari berbagai media online diperoleh gambaran tentang kesejahteraan petani tembakau, dampak kebijakan pemerintah pada saat pandemi covid-19 sebagaimana uraian berikut:

3.1.1 Kesadaran Akan Hidup Sehat Tanpa Rokok

Data Institute for Health Metrics and Evaluation (2020) menunjukkan telah terjadi pergeseran penyebab kematian di Indonesia. Tahun 1990 penyebab kematian tertinggi akibat penyakit menular, tetapi sejak tahun 2017 penyumbang kematian tertinggi adalah penyakit tidak menular yang faktor risikonya adalah perilaku, salah satunya perilaku merokok yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup para penghisap tembakau. Menurut Zhao, et al. (2020) risiko mengalami Covid-19 yang berat adalah dua kali lipat pada perokok dibanding bukan perokok. Menurut World Health Organization (2020) dampak Covid-19 akan lebih parah bagi mereka yang memiliki penyakit tidak menular. WHO melaporkan *fatality rate* pasien Covid-19 pada pasien yang punya penyakit jantung, diabetes, hipertensi, penyakit pernafasan kronik atau kanker jauh lebih tinggi dibanding dengan mereka yang tidak mengidap penyakit itu.

Masyarakat semakin sadar bahwa di tengah pandemi ini faktor kesehatan menjadi prioritas, tidak sedikit yang memahami efek merokok berpengaruh terhadap risiko tertular Covid-19. Fadia misalnya, seorang jurnalis berusia 25 tahun tidak pernah lepas dari batang rokok mengepul dari mulutnya. Setiap hari menghabiskan 1 bungkus rokok hingga akhirnya berhenti total bulan Juni 2021. Kekhawatiran akan terkena risiko Covid-19 yang lebih parah bagi seorang perokok menjadi pemicu dirinya untuk berhenti merokok. Lain lagi dengan Ihya yang berusia 29 tahun, ia biasa menghabiskan 16 batang rokok setiap harinya. Kini hanya 1-2 batang saja setiap pekan dengan alasan agar lebih hemat mengingat harga rokok di masa pandemi mengalami kenaikan (katadata.com).

Seiring dengan yang dilakukan Fadia dan Ihya dalam mengurangi rokok, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadi penurunan konsumsi rokok usia 15 tahun keatas, berkurang dari 29,03% menjadi 28,69% di awal pandemi 2020. Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan, kondisi industri hasil tembakau sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir mengakibatkan realisasi penjualan

rokok legal juga menurun drastis. Efeknya permintaan tembakau ke para petani juga menurun, yang berarti berkurangnya pendapatan petani tembakau akibat kebijakan pembatasan aktifitas.

Fakta Tembakau Indonesia 2020 yang diterbitkan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menjelaskan bahwa, aspek kesehatan adalah bagian sangat penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di antara 17 Tujuan SDGs, kesehatan adalah tujuan ke 3 (SDG-3), di mana di dalamnya terdapat 9 Target. Pada Target 3.4 dinyatakan: *By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being*. Konsumsi rokok merupakan faktor risiko tertinggi dari kematian dini akibat penyakit tidak menular. Dengan demikian, pelaksanaan yang tertera pada butir 3.a berbunyi: *Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) in all countries, as appropriate*. Implementasi FCTC secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu tonggak penting bagi pencapaian SDGs (2020).

3.1.2 Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi

Berbagai kebijakan telah diterapkan dalam mengendalikan tembakau seperti membuat Kawasan Tanpa Rokok (KTR), TAPS Ban Outdoor berupa Larangan Iklan, Promosi dan Sponsorship pada Peraturan KTR, dan Kebijakan Cukai Rokok. Selama 2013-2018, harga rokok semakin mahal. Di tahun 2019, harga rokok menjadi relatif lebih murah karena tidak ada kenaikan tarif cukai. Di tahun 2020 harga rokok relatif semakin tidak terjangkau dengan adanya kenaikan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) yang cukup tinggi (Arjoso, 2020).

Dalam 5 tahun terakhir menurut data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi tembakau di Indonesia cenderung stagnan sehingga pendapatan petani tembakau pun tidak ada peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh di tahun 2017 produksinya sebanyak 181.142 ton, naik menjadi 195.482 ton di tahun 2018. Lalu tahun 2019 sebesar 269.803 ton, tahun 2020 turun sedikit menjadi 261.439 ton, dan tahun 2021 mencapai 261.011 ton. Padahal tembakau merupakan salah satu komoditas tanaman penting di Indonesia. Peran tembakau bagi masyarakat cukup besar karena aktifitas produksi dan pemasarannya melibatkan sejumlah penduduk untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan. Petani tembakau merupakan sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, khususnya di sektor pertanian (Wahyuni dan Dinaloni, 2021).

Menurut Azis dan Susilowati (2020) sektor industri makanan minuman dan pengolahan tembakau mengalami tekanan sebesar -12,67% pada kuartal II-2020 ini jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2019. Total investasi semua sektor secara umum mengalami penurunan -21,85% yang merupakan awal masa pandemi Covid-19. Sementara menurut Wahyuni dan Dinaloni (2021) pada masa pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan kebijakan PPKM yang menyebabkan pabrik rokok mengurangi aktifitas produksinya sehingga permintaan tembakau menurun. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan harga tembakau yang menyebabkan berkurangnya pemasukan para petani tembakau pada saat panen. Pendapatan yang menurun tentu saja berdampak pada kesejahteraan petani tersebut. Pendapatan dari penjualan tembakau hanya cukup untuk menutup biaya produksi (pembelian bibit, pupuk, dan upah buruh tani) yang dikeluarkan oleh petani selama masa tanam tembakau, sedangkan untuk menutupi kebutuhan lain para petani tembakau melakukan keragaman sumber nafkah dengan melakukan pekerjaan sampingan seperti berdagang dan beternak.

Hasil penelitian Andrianingsih dan Asih (2021) di Desa Palongan, Sumenep menunjukkan biaya usahatani tembakau sejak pandemi mengalami kenaikan, sedangkan hasil produksi mengalami penurunan yang menyebabkan penurunan pendapatan sekitar 40% dari pendapatan sebelum pandemi covid19. Penurunan tersebut terjadi sejak diterapkannya *social distancing* yang menghambat aktivitas masyarakat serta penutupan beberapa instansi. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan petani tembakau sebelum pandemi Covid-19 dan setelah pandemi Covid-19 di Desa Palongan. Sebelum pandemi Covid-19 rata-rata pendapatan usahatani tembakau Rp 4.384.248, sementara pendapatan selama pandemi Rp 1.555.968. Penyebabnya, di masa pandemi terjadi penurunan penjualan sedangkan biaya tanam tembakau mengalami kenaikan. Kurangnya keseimbangan antara pasokan dan permintaan

menyebabkan fluktuasi harga tembakau dari tahun ketahun stagnan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah internal dari petani seperti rendahnya posisi tawar petani karena belum maksimalnya peran kelembagaan petani seperti koperasi, asosiasi petani tembakau, dan rendahnya produktivitas karena secara teknis petani belum memproduksi secara efisien (Hasan dan Darwanto, 2013).

Ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari petani tembakau menimbulkan pemikiran untuk beralih dari petani tembakau ke pertanian alternatif lain dengan konversi ke tanaman lain. Hasil penelitian Saniman et al (2018) menunjukkan petani tembakau di Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep beralih ke tanaman lain seperti jagung, cabai dan bawang. Ada 4 rekomendasi agar proses konversi tanaman tembakau berjalan dengan baik. Pertama, pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak akademisi guna mengkaji dan mendalami penelitian terkait tiga tanaman alternatif tersebut. Kedua, pemerintah harus lebih proaktif mengedukasi petani untuk sadar bahwa pertanian tembakau hanya merugikan mereka. Pendekatan kultural juga harus dilakukan untuk menyadarkan petani tentang dampak buruk pertanian tembakau. Ketiga, pemerintah membuat program pembangunan sumur bor di banyak lokasi, karena air merupakan hal yang paling dibutuhkan petani di Madura di samping kemudahan akses modal pertanian. Keempat, diperlukan perubahan sikap dan kesadaran pemerintah agar dapat dengan progresif mendukung proses konversi tanaman ini.

Hal serupa terjadi pada petani tembakau di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Madura, dimana banyak petani telah beralih dari tanaman tembakau ke tanaman bawang merah, terutama di Desa Ponjanan Barat. Meskipun beberapa masih mempertahankan tanaman tembakau, hasil penelitian menunjukkan pendapatan petani di pertanian bawang merah lebih besar dari pendapatan usahatani tembakau. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani untuk mengolah bawang merah adalah partisipasi kelompok tani, pendapatan dan intensitas tanam (Sholeh, *et al 2018*). Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi usahatani tembakau, ada beberapa alternatif pemecahan yang bisa dilakukan: mengurangi luas areal tanam tembakau, tanaman pengganti tembakau, budidaya tanaman tembakau rendah nikotin, diversifikasi produk turunan tembakau, mengoptimalkan kelembagaan pertanian (Hasan & Darwanto, 2013).

Menurut hasil penelitian Arrohman (2014) moral ekonomi petani tembakau untuk tetap menanam tembakau memiliki rasionalitas tersendiri yang digolongkan dalam tiga faktor yaitu mencari keuntungan secara ekonomi, sosial dan budaya. Petani tembakau merupakan petani yang rasional karena telah mengetahui dengan benar apa konsekuensi yang mereka dapatkan dari bertahan di usaha ini. Keuntungan secara ekonomi terkait pada asumsi yang mereka bangun bahwa tembakau sebagai tanaman komoditi yang dibutuhkan baik di pasaran dalam maupun luar negeri, harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman subsistem. Keuntungan secara sosial terkait pada pengakuan sosial masyarakat terhadap suatu kedudukan atau tingkatan tertentu pada posisi yang dihormati. Ada kebanggaan tersendiri jika mereka berhasil dan sukses dalam menanam tembakau, dengan mengesampingkan persoalan bahwa kadangkala usaha membudidayakan tembakau sering mengalami kegagalan. Sedangkan keuntungan secara kultural terkait pada usaha mereka untuk melestarikan tradisi yang telah berlangsung lama, yakni tembakau sebagai tanaman alternatif yang selalu diusahakan setiap musim tanam, menanam tembakau merupakan kebiasaan yang sulit ditinggalkan oleh petani karena ada perasaan tidak sempurna bila dalam usaha pertaniannya tidak menanam tembakau.

Pemerintah menghadapi dilema, di satu sisi mengeluarkan kebijakan terkait pandemi Covid-19 tetapi disisi lain pemerintah dianggap mencederai kemandirian ekonomi terutama petani tembakau. Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Haryono (2020) mengatakan bahwa permasalahan Industri Hasil Tembakau (IHT) saat ini adalah belum terwujudnya iklim kompetisi harga di tingkat konsumen yang terdistorsi, mutu tembakau dan pasokan tembakau tidak sesuai dengan kebutuhan yang ambivalen, adanya ketidakpastian usaha, serta beban cukai dan pajak yang tinggi. Selain itu perlu adanya peningkatan

kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitas petani dan lahan, pengadaan benih unggul, peningkatan teknik budi daya/good agriculture practices (GAP), intensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi usaha tani tembakau, peningkatan program kemitraan, peningkatan mutu SDM dalam penguasaan teknologi.

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 2017). Menurut Dye, semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah.

Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku merokok, bukanlah karena kebijakan. Sehingga pemerintah tidak perlu memberikan kebijakan yang bisa mencekik petani tembakau. Seperti hasil penelitian Suhartini (2019) bahwa perilaku merokok pada siswa tidak ada hubungan antara pengetahuan, dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan perilaku merokok. Kebiasaan merokok selain dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri seseorang, juga dari faktor lingkungan. Namun, kebijakan PPKM sangat memengaruhi kesejahteraan petani dikarenakan susah nya pemasaran tembakau yang membuat tembakau banyak yang busuk.

3.1.3 Ekonomi Politik dan Solusi Kebijakan

Ekonomi politik adalah sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan yang mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait. Kita mengetahui bahwa perekonomian tidak bisa hanya diserahkan pada produsen dan konsumen yang berinteraksi satu sama lain melalui mekanisme pasar (Handaka & Surokim 2014).

Dari penelitian Handaka & Surokim (2014) ada beberapa kebijakan yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Daerah yaitu: pertama, penentuan patokan harga tembakau. Kedua, membuat kebijakan tentang standarisasi kualitas tembakau. Ketiga, pengadaan modal untuk petani tembakau. Keempat, tiap kecamatan perlu untuk memiliki gudang yang besar dan baik untuk menampung tembakau petani bila harga sedang tidak stabil. Kelima, warga perlu membuat kontrak politik dengan para calon legislatif ketika ada Pemilu. Dengan kontrak politik untuk perbaikan nasib petani tembakau ini, kepentingan petani bisa lebih diperjuangkan di lembaga legislatif (DPRD). Kebijakan yang pernah dicetuskan jauh sebelum pandemi nampaknya bisa dibahas kembali karena relevan dengan kondisi saat ini.

4. KESIMPULAN

Sektor pertanian termasuk yang tetap eksis di masa pandemi Covid-19 dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Tetapi pertanian tembakau termasuk subsektor yang terkena dampak cukup signifikan akibat kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Kebijakan *social distancing* menyebabkan pabrik rokok mengurangi aktifitas produksinya sehingga permintaan tembakau menurun. Sebelum pandemi Covid-19 rata-rata pendapatan usahatani tembakau Rp 4.384.248, sementara pendapatan selama pandemi Rp 1.555.968. Penyebabnya, di masa pandemi terjadi pembatasan aktifitas warga akibat kebijakan berskala terbatas sehingga terjadi penurunan penjualan sekitar 35%-40%, sedangkan biaya tanam tembakau mengalami kenaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadi penurunan konsumsi rokok usia 15 tahun keatas, berkurang dari 29,03% menjadi 28,69% di masa awal pandemi masuk Indonesia karena kebijakan *work from home* dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat di masa pandemi, hal ini berdampak pada pengurangan pendapatan petani tembakau.

Petani berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada para petani, misalnya stabilisasi harga tembakau, mendapat manfaat dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengurangi impor tembakau.

REFERENCES

- Andrianingsih, V., & Laras Asih, D. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Petani Tembakau Di Desa Palongan. *Jurnal Pertanian Cemara*, 18(2), 55–62. <https://doi.org/10.24929/fp.v18i2.1634>
- Arjoso, S. (2020). A. T. I. 2020. J. T. C. S. C.-I. A. K. M. I. (TCSC-I. (2020). *Atlas Tembakau Indonesia Tahun 2020 [Indonesia Tobacco Atlas 2020]*. 33. <http://www.tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-Tembakau-Indonesia-2020.pdf>
- Arrohman, P. (2014). Moral Ekonomi Petani Tembakau Mumbulsari Jember. Jember: Universitas Jember.
- Azis, M., Dermoredjo, S. K., & Susilowati, G. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Investasi Sektor Pertanian. *Pse. Litbang. Pertanian. Go. Id*, 3, 107-125.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design; Choosing among five approach*. In *SAGE Publications, Inc.*
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Dye, T. R. (2017). *Public Policy ES Fifteenth Edition*. 368.
- Hadiwardoyo, Wibowo. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Baskara*, Vol. 2, No. 2. Hal 83-92.
- Handaka ,T. Surokim. (2014). Pola Komunikasi Kelompok Petani Tembakau Madura sebagai Basis Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Politik. *Jurnal KARSA*, Vol. 22. No. 2. Hal 178-193.
- Haryono Imam. (2020). Road Map 2007-2020 Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai. <http://balittas.litbang.pertanian.go.id/images/pdf/sby60.pdf>. 26 Desember 2021 (14:22).
- Hasan, F., & Darwanto, D. H. (2013). Prospek dan Tantangan Usahatani Tembakau Madura. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 10(1), 63-70. <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210731/12/1424336/nasib-petani-tembakau-dan-kesejahteraannya>. 26 Desember 2021 (08:13).
- <https://kumparan.com/tugujogja/wabah-corona-berdampak-signifikan-terhadap-pertanian-tembakau-di-temanggung-1tECGLsTVkH>. 28 Desember 2021 (20:15).
- <https://republika.co.id/berita/q83lp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19>. 26 Desember 2021 (14:18).
- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. (2020). Fakta Tembakau Indonesia 2020, BAB XV Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Hubungan Pengendalian Tembakau dengan SDGs.
- Indonesia Development Foundation. (2021). *Tobacco Economic Ecosystem in Indonesia: A Scoping Study Report*.
- Institute for Health Metrics and Evaluation. (2020). <https://vizhub.healthdata.org>. Retrieved from <http://www.healthdata.org/>: <https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>. 27 Desember 2021 (10:06).
- Jas, Admar. (2013). Tembakau dan Alkohol, Manfaat dan Mudaratnya. *Majalah Kedokteran Nusantara The Journal of Medical School*, Vol. 46, No. 3 Fakultas Kedokteran USU.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 6Th Edition. Pearson Education, Inc
- Parnell, D., Widdop, P., Bond, A., & Wilson, R. (2022). COVID-19, networks and sport. *Managing Sport and Leisure*, 27(1–2), 72–78. <https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1750100>
- Rahmadi, Adolf. (2013). Hubungan Pengetahuan dan Sikap terhadap Rokok dengan Kebiasaan Merokok Siswa SMP di Kota Padang, *Jurnal FK Unand, Jurnal kesehatan Andalas*, Vol. 2, No. 1. Hal 25-28.
- Saniman., Faidal., Emilia, Atik. (2018). Peluang Konversi Tanaman Bagi Petani Tembakau di Madura. Laporan Penelitian Pusat Kajian Manajemen dan Kewirausahaan (Universitas Trunojoyo Madura).
- Sholeh, M. S., Baihaqi, B., Muhsin, A., & Ariyanto, A. (2018). Perilaku Petani Dalam Alih Komoditas Tanaman Tembakau Ke Bawang Merah (Di Kecamatan Batumarmar). In *National Conference on Mathematics, Science and Education (NACOMSE)* (Vol. 1, No. 01, pp. 1-8).
- Suhartini A. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Perilaku Merokok Siswa SLTA Di Rangkasbitung Tahun 2019. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)* Vol.6. No. 2. Hal 255-264.
- Tuwu, Darmin. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Publichuo*, Vol. 3, No. 2. Hal 267-278.
- Wahyuni, D., dan Dinaloni, D. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau di Kabupaten Jombang. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, Vol. VII, No. 2. Hal 31-40.
- Zhao, Q., Meng, M., Kumar, R., Wu, Y., Huang, J., Lian, N., ... & Lin, S. (2020). The Impact of COPD and Smoking History on the Severity of COVID-19: A systemic review and meta-analysis. *Journal of Medical Virology*, Vol. 92 No.10. Hal 1915-1921.